



PERAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN NEGARA DI SDN LIDAH WETAN II

Rengga Aprilia, Nadhifa Ardiana Maharani, Muslikhatus Sa'diah, Eliya Uslifatul Janah, Ari Metalin Ika Puspita

Universitas Negeri Surabaya
Rengga.22052@mhs.unesa.ac.id

Abstract: *The rights and duties of citizens are basic concepts in a democratic system of government that play a key role in keeping the social and political order functioning properly. The rights and obligations of citizens in the educational environment are important in carrying out daily activities at school. This research focuses on the role of citizens' rights and obligations in the educational environment, especially at SDN Lidah Wetan II. The method used is to use a descriptive qualitative approach by involving class V teachers and 3 class V students at SDN Lidah Wetan II. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation. This study aims to determine the role of teachers and students in understanding the rights and obligations of citizens. The results of this study indicate that teachers can understand the role of the rights and obligations of citizens well, while the learners have not been able to know the role of the rights and obligations of citizens and difficult to distinguish between rights and obligations in daily activities.*

Keywords: *Citizen, Obligations, Primary School, Rights*

Abstrak Hak, dan kewajiban warga negara merupakan konsep dasar dalam sistem pemerintahan demokratis yang memainkan peran kunci dalam menjaga tatanan sosial dan politik agar berfungsi dengan baik. Hak dan kewajiban warga negara di lingkungan pendidikan menjadi satu hal yang penting dalam menjalani kegiatan sehari-hari di sekolah. Penelitian ini berfokus pada peran hak dan kewajiban warga negara di lingkungan pendidikan, utamanya di SDN Lidah Wetan II. Metode yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melibatkan guru kelas V dan 3 peserta didik kelas V di SDN Lidah Wetan II. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru dan peserta didik dalam memahami hak dan kewajiban warga negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa guru dapat memahami peran hak dan kewajiban warga negara dengan baik, sedangkan para peserta didik belum mampu mengetahui peran hak dan kewajiban warga negara serta sulit membedakan antara hak dan kewajiban dalam kegiatan sehari-hari.

Keywords: Hak, Kewajiban, Sekolah Dasar, Warga Negara.

Pendahuluan

Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari latar belakang agama, suku, budaya, bahasa, warna kulit dan tempat yang berbeda. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, dalam Pasal 27 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hak dan kewajiban sebagai warga negara tidak bisa dipisahkan baik satu sama lainnya, yang membuat praktek dalam kehidupan sehari-hari harus seimbang antara hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam



pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Semua warga negara Indonesia juga harus memenuhi hak dan kewajiban, jika seseorang ingin haknya dipenuhi maka harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Pemenuhan kewajiban warga negara seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk ketaatan terhadap negara tercinta. Warga negara Indonesia yang baik adalah orang yang tidak hanya menuntut perlindungan hak nya tetapi juga dapat memenuhi tugas serta kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Kesadaran tentang pentingnya hak serta kewajiban tidak hanya harus dimulai saat usia dewasa, tetapi juga sejak dini harus mengenal tentang hak serta kewajiban (Haifarashin et al., 2021).

Hak negara diterjemahkan menjadi kewajiban yang mutlak dihormati oleh warga negara. Misalnya, jika setiap warga negara berhak atas pendidikan, maka negara wajib menyediakan fasilitas pendidikan bagi warganya. Sebaliknya, jika negara berhak untuk dibela oleh setiap warga negara, maka warga negara berkewajiban untuk membela negara. Dalam UUD 1945, hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta hak dan kewajiban negara Indonesia diatur dalam Pasal 27 sampai dengan 34 yang meliputi bidang: politik dan pemerintahan, sosial, agama, pendidikan, dan pertahanan (Farahdiba et al., 2021).

Akhir-akhir ini sering melihat adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban, sebagai contoh tingginya tuntutan mengenai hak tentang suatu masalah tanpa diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban yang memadai. Atau malah sebaliknya, kewajiban dilaksanakan semestinya tetapi hak nya tak kunjung terpenuhi. Hal ini sering kali terjadi dalam lapangan pekerjaan serta tingkat kehidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah guru kelas V dan 3 peserta didik kelas V SDN Lidah Wetan II. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas V SDN Lidah Wetan II. Wawancara dilakukan pada saat jam istirahat kepada para peserta didik dan pada jam pelajaran ke empat kepada guru kelas V sembari observasi langsung di kelas. Dokumentasi diambil guna mengambil data mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan dokumen lain yang berhubungan dengan perubahan peran hak dan warga negara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengetahuan guru dan peserta didik mengenai peran hak dan kewajiban warga negara di lingkungan sekolah. Instrumen dan teknik pengumpulan data, selain menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti juga berfungsi sebagai *human instrument* dengan teknik pengumpulan data/*participant observation* dan wawancara yang mendalam/*in deep interview*. Dengan ini



peneliti harus berinteraksi dengan sumber data supaya peneliti mengenal dengan baik informan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Hak Warganegara

Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari hak yang paling dasar, seperti hak hidup bermartabat, hak memilih keyakinan, hak menentukan nasib sendiri. Semua warga negara dapat menikmati haknya apabila terlebih dahulu memenuhi kewajibannya dengan semaksimal mungkin. Konsep hukum juga diungkapkan atau dijelaskan menurut pendapat berbagai ahli. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut paksa olehnya (Sumarsono, 2001).

Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain (Farahdiba et al., 2021). Sedangkan menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum di Indonesia, mendefinisikan hak sebagai suatu kekuasaan seseorang yang dijamin oleh hukum, yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang apabila dilanggar akan diberikan perlindungan oleh hukum (Farahdiba et al., 2021).

Pendapat lain mengemukakan, menurut Srijanti, Hak adalah elemen normatif yang memandu tindakan, melindungi kebebasan, dan memastikan bahwa setiap orang dapat menjaga martabat dan harga dirinya. Menurut Notonymro, hak tersebut dimiliki oleh subyek tertentu. Hak untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau dilakukan dan pada umumnya tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipaksa untuk melakukannya (Haifarashin et al., 2021).

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hak warga negara merupakan kekuasaan yang dimiliki warga negara untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, hak sebagai warga negara menjadi hak istimewa yang mengharuskan seorang warga negara diperlakukan sesuai dengan hak istimewa tersebut. Hak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak umum dan hak khusus atau. Hak secara umum adalah apa yang kita ketahui tentang hak. Sedangkan hak khusus adalah hak yang telah diatur oleh negara dalam ketentuan khusus dan mempunyai batasan hukum (Farahdiba et al., 2021).

Hak dapat diartikan sebagai apa yang dibutuhkan seseorang untuk melindungi kesejahteraannya dan mencapai atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan setiap orang untuk terlibat dalam memperjuangkan hak-haknya dan secara terbuka mengekspresikan pendapat dan gagasannya sebagai warga negara. Uraian ini dimaksudkan untuk menyoroti pentingnya dan keterbatasan hak warga negara Indonesia atas kebebasan berekspresi di tempat umum. Semua warga negara dapat



dengan bebas menggunakan haknya, termasuk kemampuan untuk menggunakan hak hukumnya. Namun, dengan syarat pelanggaran tersebut tidak berdampak pada hak orang lain, hukum yang berlaku, ketertiban umum, dan praktik baik (Kusumaatmadja & Sidharta, 2009).

Warga negara menikmati hak-hak sipil sesuai dengan hukum. Setiap warga negara tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum dan peraturan. Hak-hak yang dimiliki warga negara antara lain: (Gaini et al., 2023).

1. Hak atas perlindungan. Dimanapun berada, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah agar dapat merasa nyaman dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Hak setiap warga negara untuk menganut keyakinan beragama. Negara menjamin kebebasan beragama setiap individu yang berkeyakinan. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perlindungan kebebasan beragama, yaitu negara menjamin kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
3. Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan aktif dalam pertahanan negara. Menurut Bab 10, Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam upaya bela negara.

2. Pengertian Kewajiban Warganegara

Kewajiban ialah suatu hal yang harus dan wajib dilakukan oleh seseorang didalam pelaksanaan peran yang dimiliki sebagai seorang warga negara dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan atas hak yang selaras dengan kewajiban yang telah dilaksanakan (Moendoeng, 2019). Suatu negara akan menjadi negara yang aman dan damai ketika seluruh warga negara menyadari dengan sepenuhnya kewajiban-kewajiban yang dimiliki dan harus dilaksanakan sehingga mereka juga akan mendapatkan hak-hak yang sudah seharusnya mereka terima setelah mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dimiliki.

Bahkan sejak jaman dijajah hingga ke jaman kerajaan, Indonesia telah tercatat bahwa terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Hal ini dapat dilihat dari warga Indonesia yang selalu memenuhi perintah dan kewajiban yang diberikan oleh Jepang dan juga Belanda baik memaksa rakyat untuk bekerja tanpa upah maupun memaksa para petani untuk membagi hasil dari panen sawah mereka. Warga Indonesia menjalani dengan patuh kewajiban yang diberikan kepada mereka oleh pihak tinggi sesuai dengan hukuman dan ketentuan yang sudah ditentukan. Saat mereka tidak memenuhi kewajiban yang telah diberikan, mereka akan diberikan hukuman dan penghakiman. Namun meskipun demikian, ketaatan yang dimiliki oleh warga Indonesia tidak diimbangi dengan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan (Assyifa et al., 2023).



Kewajiban merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam hal ini warga negara untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya, menurut Liani, dkk dalam (Mediatati & Jati, 2023). Di dalam suatu konteks tertentu, umumnya Masyarakat sudah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Namun, dikarenakan setiap individu memiliki banyak aktivitas yang juga banyak ragamnya, maka mereka seringkali melupakan hak-hak dan juga kewajiban yang mereka miliki (Filah, 2020).

Adapun kewajiban yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang tertuang didalam undang-undang Dasar 1945 antara lain, kewajiban untuk turut serta didalam upaya bela negara, hak untuk ikut serta didalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, dan lain sebagainya (Moendoeng, 2019).

3. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Sekolah

Dimanapun manusia berada, ia mempunyai hak dan kewajiban, tidak terkecuali disekolah (Dewi, 2020). Hak dan kewajiban menjadi dua konsep dasar dalam hukum dan etika yang mengatur hubungan antara individu atau kelompok dengan entitas lain, seperti negara, masyarakat, atau sekolah. Sebagai pelajar yang beradab, hak dan kewajiban sering kali saling terkait. Hak individu sering kali diimbangi dengan kewajiban yang sesuai untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia harus dilaksanakan dan dipelihara dengan baik agar tercipta kehidupan yang sesuai sesuai konsep selaras, serasi, dan seimbang (Abdulkarim, 2007).

Di lingkungan sekolah, siswa mempunyai hak dan kewajiban yang perlu dihormati, diperhatikan, dan dilindungi. Sekolah bukan hanya sekedar tempat belajar, namun juga tempat pembentukan karakter dan pengembangan potensi. Dalam hal ini hak dan kewajiban sekolah harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Hak warga sekolah adalah segala sesuatu yang berhak dan pantas dimiliki secara mutlak oleh setiap individu baik guru maupun siswa selama berada di lingkungan sekolah. Sedangkan kewajiban warga sekolah adalah segala sesuatu yang harus dan wajib dilakukan serta ditaati oleh semua warga sekolah seperti guru dan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat siswa belajar dan mengembangkan potensi dirinya.

Materi pembelajaran mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah dasar salah satunya adalah materi tentang hak dan tanggung jawab siswa sebagai warga negara, materi ini penting untuk diajarkan sebagai wadah partisipasi warga dalam pembangunan nasional (Prasetia, 2019). Sebab pembangunan negara adalah pembangunan generasi muda. Sebagai generasi muda, mahasiswa merupakan penerus dan penerus bangsa dan negara, mereka perlu meningkatkan wawasan dan pengetahuannya tentang negara ini serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, partisipasi warga memerlukan pendidikan melalui berbagai cara, seperti membayar pajak, menjaga



kelestarian lingkungan hidup, mengikuti program wajib belajar, tertib transportasi, menyelenggarakan Siskamling, dan lain-lain.

Peran guru dalam membekali siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat dilakukan melalui penilaian moral dan sikap pada diri peserta didik di sekolah, Namun dalam penerapannya pengembangan nilai sikap dan moral pada diri siswa mustahil untuk dicapai apabila siswa tidak memahami konsep tentang nilai dan moral itu sendiri (Magdalena et al., 2020).

A. Hak Guru Dalam Pendidikan

Dalam perspektif guru, salah satu hak utama yang harus diberikan oleh negara adalah fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai ini memungkinkan guru untuk fokus pada tugas utamanya, yaitu mengajar dan mendidik anak-anak. Terlalu banyak administrasi dan perubahan kurikulum dapat mengganggu kualitas pengajaran guru. Di SDN Lidah Wetan 2, perubahan kurikulum dan tugas administratif yang berlebihan menjadi tantangan dalam memastikan guru dapat memberikan pendidikan yang berkualitas

B. Tanggung Jawab Guru Terhadap Siswa Dan Masyarakat

Guru memiliki tanggung jawab besar terhadap siswa dan masyarakat. Pendidikan di SDN Lidah Wetan 2 juga membantu siswa memahami tanggung jawab sosial yang harus dimiliki oleh warga negara terhadap masyarakat dan pemerintah mereka yang mencakup pendidikan untuk mencetak anak-anak yang berperilaku baik. Kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru mempengaruhi hasil dari peserta didik, yang pada gilirannya berdampak pada tingkah laku anak-anak di masyarakat. Meskipun tanggung jawab guru penting, orang tua juga memiliki peran yang signifikan dalam mendidik anak-anak di rumah

C. Metode Pengajaran Pkn

Di SDN Lidah Wetan 2, pendekatan pengajaran yang memperhatikan latar belakang dan sensitivitas siswa digunakan. Ini membantu guru untuk mengajar dengan lebih efektif dan memahami kebutuhan individu siswa. Bagi siswa yang memiliki, pemahaman yang berbeda mengenai hak dan kewajiban guru akan menjadi penengah dan mengarahkan seperti mengapa hal tersebut masuk hak dan kenapa hak tersebut dapat dikatakan kewajiban, memberikan pengetahuan dan dukungan kepada siswa dan membebaskan siswa mengambil kesimpulan sendiri, hal ini dapat membantu siswa memahami konsep hak dan kewajiban warga negara secara lebih mendalam. Dalam pembelajaran agar murid lebih paham guru juga melibarkan studi kasus yang ada disekitar seperti membahas situasi di mana anak dari ekonomi menengah ke bawah melakukan pencurian dan dibandingkan dengan seorang anak dari ekonomi menengah atas yang juga melakukan pencurian, namun mendapat hukuman yang lebih ringan karena berasal dari keluarga yang berpengaruh. Selain itu, mengambil contoh kasus di mana seorang koruptor mencuri sandal di masjid, tetapi



masih bebas. dan menanyakan contoh - contoh studi kasus ini ke peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya. Dengan memberikan contoh-contoh kecil seperti ini, diharapkan peserta didik akan lebih mudah memahami konsep hak dan kewajiban warganegara.

D. Evaluasi Dan Tantangan Yang Harus Dihadapi

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) diajarkan selama 4 jam dalam seminggu di SDN Lidah Wetan II namun, pemahaman hak dan kewajiban warganegara harus diajarkan dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, tidak hanya saat pelajaran PKN saja. Penilaian dan evaluasi terhadap pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara dilakukan secara berkala. Pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban warganegara harus dievaluasi secara berkala. Hal ini dapat dilakukan melalui ujian, proyek, atau diskusi kelas. Ini membantu guru memahami sejauh mana siswa telah memahami konsep tersebut. Mengajar PKN dapat memiliki tantangan tersendiri, seperti memastikan pemahaman mendalam siswa dan mengatasi perbedaan latar belakang budaya dan pemah

4. Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar

Sekolah merupakan suatu lembaga yang telah dibuat dan dirancang dengan tujuan untuk pembelajaran siswa atau peserta dengan berada di bawah pengawasan pendidik/guru dengan maksud agar peserta didik mengalami sebuah kemajuan ketika proses pembelajaran telah selesai dituntaskan. Sekolah dengan sengaja didirikan dalam artian keputusan didalam mendirikan sekolah ini telah direncanakan dan telah menjadi suatu keputusan dengan maksud untuk mempermudah pembelajaran yang beragam (Sari, 2020).

Sedangkan, Sekolah Dasar ialah salah satu tingkat atau jenjang pendidikan yang dianggap sebagai jenjang pendidikan yang paling dasar. Dalam pendidikan formal yang ada di Indonesia ini Sekolah Dasar adalah jenjang pendidikan yang paling dasar. Sekolah Dasar ini juga dapat dikatakan sebagai suatu institusi pendidikan yang secara umum melaksanakan proses pendidikan dasar serta menjadi dasar proses pendidikan yang akan datang. Pada jenjang pendidikan dasar ini, peserta didik akan mengalami suatu proses yang dinamakan sebagai proses pembelajaran dan proses pendidikan (Indrayani, 2020).

Pada jenjang Sekolah Dasar, peserta didik yang menempuh pendidikan ini adalah peserta didik yang berumur 7 hingga 12 tahun, dengan rentang waktu 6 tahun. Pendidikan di jenjang Sekolah dasar ini diselenggarakan untuk peserta didik yang sudah berusia 7 tahun. Peserta didik dengan usia 7 tahun ini telah memiliki kebutuhan akan pendidikan dan tingkat pemahaman yang sesuai sebagai asumsi mengapa pada jenjang Sekolah dasar, pendidikan ini diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia 7 tahun. Adapun tujuan dari pendidikan dasar ini pada intinya adalah dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan serta sikap yang dimiliki peserta didik, sehingga dapat memberikan manfaat pada peserta didik untuk nantinya terjun didalam dunia masyarakat (Indrayani, 2020).

A. Peran Pendidikan Dalam Memahami Hak Dan Kewarganegaraan



Sekolah berperan penting dalam membantu siswa memahami hak dan kewarganegaraan mereka. Melalui pengajaran materi yang mencakup hak dan kewajiban serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, siswa diajak untuk memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari mereka di sekolah dan dalam masyarakat. Di SDN Lidah Wetan 2, yang telah menerapkan kurikulum merdeka dengan profil pelajar pancasila membuat pendidikan kewarganegaraan diintegrasikan lebih diperkuat daripada sebelumnya. Untuk lebih memahami terkait hak dan kewajiban warga negara sekolah mengadakan kegiatan demokrasi walaupun masih sebatas pemilihan ketua kelas disetiap kelas, dengan cara peserta didik di kelas tersebut ada yang mengajukan diri lalu di-voting terbanyak dan yang terbanyak akan menjadi ketua kelas. Mungkin diskusi antar kelas itu ada tapi tidak banyak karena masih terkendala oleh waktu

B. Peran Hak Asasi Manusia Dalam Sekolah Sdn Lidah Wetan II

Mendapatkan pendidikan menjadi lebih mudah jika tinggal di kota karena pengajaran, fasilitas, dan biaya sekolah semuanya disediakan oleh sekolah secara gratis. Namun, di desa mungkin masih ada beberapa tantangan dalam hal ini. Di Surabaya, hak-hak pendidikan sudah terpenuhi dengan baik, bahkan ada upaya aktif untuk mendorong siswa untuk hadir ke sekolah. Dinas perlindungan anak bahkan bekerja sama dengan sekolah untuk memastikan semua anak bersekolah. Dengan kata lain, anak-anak diwajibkan untuk sekolah, bahkan jika mereka atau orang tua mereka tidak ingin, ini merupakan kewajiban yang harus dipatuhi.

Kesimpulan

Dalam perspektif guru, salah satu hak utama yang harus diberikan oleh negara adalah fasilitas yang memadai agar fokus pada tugas utamanya, yaitu mengajar dan mendidik anak-anak. Di SDN Lidah Wetan 2, perubahan kurikulum dan tugas administratif yang berlebihan menjadi tantangan dalam memastikan guru dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Guru memiliki tanggung jawab yang besar terhadap siswa dan masyarakat. Pendidikan di SDN Lidah Wetan 2 dapat membantu siswa memahami tanggung jawab sosial yang harus dimiliki oleh warga negara terhadap masyarakat dan pemerintah mereka yang mencakup pendidikan untuk mencetak anak-anak yang berperilaku baik. Di SDN Lidah Wetan 2, telah menerapkan kurikulum merdeka dengan profil pelajar pancasila membuat pendidikan kewarganegaraan diintegrasikan lebih diperkuat daripada sebelumnya.

Peran hak asasi manusia dalam Sdn Lidah Wetan II yaitu mendapatkan pendidikan yang lebih mudah jika tinggal di kota karena pengajaran, fasilitas, dan biaya sekolah semuanya disediakan oleh sekolah secara gratis. Di Surabaya, hak-hak pendidikan sudah terpenuhi dengan baik, bahkan ada upaya aktif untuk mendorong siswa untuk hadir ke sekolah. Di SDN Lidah Wetan 2 menggunakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan latar belakang dan sensitivitas siswa. Ini membantu guru untuk mengajar dengan lebih efektif dan memahami kebutuhan individu siswa. Bagi siswa yang memiliki, pemahaman yang



berbeda mengenai hak dan kewajiban guru akan menjadi penengah. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) diajarkan selama 4 jam dalam seminggu di SDN Lidah Wetan II namun, pemahaman hak dan kewajiban warganegara harus diajarkan dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, tidak hanya saat pelajaran PKN saja. Penilaian dan evaluasi terhadap pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara dilakukan secara berkala

Saran

Pemahaman peserta didik mengenai hak dan kewajiban warga negara ini merupakan pembelajaran yang sangat penting, sehingga akan lebih baik apabila pembelajaran mengenai hak dan kewajiban ini diimplementasikan lagi dengan kehidupan peserta didik dengan baik. Selain itu peran tenaga pendidik sangat penting didalam perkembangan mengenai pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai hak dan kewajiban warga negara, maka pendidik perlu memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat disertai dengan contoh nyata sehingga memudahkan peserta didik didalam memahami hak dan kewajiban warga negara. Kemudian, sangat disayangkan apabila pendidik ini kurang mampu untuk memberikan pembelajaran secara maksimal mengingat beban yang dimiliki oleh pendidik mengenai beban dalam melakukan pembelajaran masih harus ditambah dengan beban administrasi sekolah dan lain sebagainya. Sehingga pendidik kurang memiliki fokus yang terarah terhadap peserta didik. Oleh karena itu, peran orangtua juga akan sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman peserta didik mengenai hak dan kewajiban warga negara dimulai dari hal-hal yang paling sederhana terlebih dahulu.

Daftar Pustaka

- Abdulkarim, A. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun warga negara yang demokratis*. PT Grafindo Media Pratama.
- Assyifa, S., Rahmawati, N. A., Maulana, A., Aprila, P., & Ilham, M. A. (2023). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Bidang Pendidikan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).
- Dewi, N. P. C. P. (2020). *Buku ajar mata pelajaran sekolah dasar pkn dan pancasila*. Nilacakra.
- Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837–845.
- Filah, N. (2020). *Hak dan kewajiban warga negara*.
- Gaini, N., Nugraha, R. P., Agustin, R. H., & Putri, S. J. (2023). REALISASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI KALANGAN PELAJAR DAN PENERAPANNYA DI KEHIDUPAN SEHARI-HARI. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(4), 337–342.



-
- Haifarashin, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7261–7265.
- Indrayani, N. (2020). *Perbedaan motivasi belajar antara anak SD dengan anak MI pada masa pandemi covid-19 di desa barejulat tahun pelajaran 2020/2021*. UIN Mataram.
- Khufi, I. A., Jamil, N. A., Astiza, S. R., Kalsum, S. N. U., Idayanti, W., Kurniawan, W., & Suryadi, W. (2020). Mimplementasi Hak Peserta Didik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Di Sdn Batuan IK. *ALPEN: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(2), 65–71.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, PT. Alumni, Bandung, cet-2.
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Bintang*, 2(3), 418–430.
- Mediatati, N., & Jati, D. H. P. (2023). Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia bagi Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandung. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3106–3111.
- Moendoeng, N. G. K. (2019). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Praselia, H. (2019). Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Pemahaman Siswa Mengenai Hak dan Kewajiban Siswa Sekolah Dasar Sebagai Warga Negara. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 5(2), 967–975.
- Sari, Y. (2020). Peningkatan kerjasama di sekolah dasar. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 1(1).
- Sumarsono, S. (2001). *Pendidikan kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama.